

Pengelolaan Lembaga Pendidikan Islam dalam Perspektif Manajemen Pendidikan

Muammar Idwin^{1*}, Martin Kustati², Rezki Amelia³

¹⁻³ Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, Indonesia

Email : muammaridwin07@gmail.com^{1*}, martinkustati@uinib.ac.id², rezkiamelia1987@gmail.com³

Abstract, *This research aims to analyze the management of Islamic educational institutions from the perspective of educational management. Using the literature study method, this research examines various literatures related to strategic planning, organization, Islamic leadership, human resource management, and the implementation of holistic and integrated learning. The research results indicate that the management of Islamic educational institutions requires an integration between modern managerial principles and noble Islamic values, to create institutions that excel not only in academic aspects but also in character and moral development of students. Furthermore, the principles of accountability and transparency in supervision and evaluation are key factors in ensuring the sustainability and success of Islamic educational institutions. This research contributes to understanding the managerial concepts based on Islamic values in managing quality Islamic educational institutions.*

Keywords : *Educational Management, Islamic Educational Institution Management, Islamic Leadership*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan lembaga pendidikan Islam dalam perspektif manajemen pendidikan. Dengan menggunakan metode studi pustaka, penelitian ini mengkaji berbagai literatur yang berkaitan dengan perencanaan strategis, pengorganisasian, kepemimpinan Islami, pengelolaan sumber daya manusia, serta pelaksanaan pembelajaran yang holistik dan terintegrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan lembaga pendidikan Islam membutuhkan integrasi antara prinsip-prinsip manajerial modern dan nilai-nilai Islam yang luhur, untuk menciptakan lembaga yang tidak hanya unggul dalam aspek akademik, tetapi juga dalam pembentukan karakter dan akhlak peserta didik. Selain itu, prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengawasan dan evaluasi menjadi faktor kunci untuk memastikan kelangsungan dan keberhasilan lembaga pendidikan Islam. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam memahami konsep manajerial yang berbasis nilai Islam dalam pengelolaan lembaga pendidikan Islam yang berkualitas.

Kata kunci : Kepemimpinan Islami, Manajemen Pendidikan, Pengelolaan Lembaga Islam

1. PENDAHULUAN

Pendidikan Islam merupakan sarana utama dalam membentuk manusia yang beriman, berilmu, dan berakhlak mulia sesuai ajaran Islam. Dalam prosesnya, pendidikan Islam tidak hanya berfokus pada aspek kognitif, tetapi juga mencakup dimensi afektif dan psikomotorik yang berlandaskan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan. Seiring dengan perkembangan zaman, tantangan yang dihadapi lembaga pendidikan Islam semakin kompleks, baik dari segi internal maupun eksternal. Internalisasi nilai-nilai Islam dalam sistem pendidikan harus berjalan seiring dengan peningkatan mutu manajemen kelembagaan agar pendidikan yang diberikan benar-benar relevan, berkualitas, dan mampu menjawab kebutuhan umat serta perkembangan masyarakat global (Akhyar & Zukdi, 2025).

Lembaga pendidikan Islam, baik yang berbentuk formal seperti madrasah dan pesantren, maupun non-formal seperti majelis taklim dan pendidikan diniyah, memerlukan sistem pengelolaan yang terstruktur dan profesional. Pengelolaan atau manajemen lembaga pendidikan menjadi kunci utama dalam menentukan keberhasilan pencapaian tujuan pendidikan itu sendiri. Manajemen pendidikan dalam hal ini mencakup serangkaian proses mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, hingga evaluasi terhadap seluruh kegiatan pendidikan. Ketika manajemen diterapkan dengan baik dan sesuai prinsip-prinsip Islami, maka lembaga pendidikan akan memiliki arah yang jelas, efisiensi dalam pengelolaan sumber daya, serta kualitas output yang unggul secara intelektual dan spiritual.

Menurut perspektif manajemen pendidikan, pengelolaan lembaga pendidikan Islam menuntut perhatian khusus terhadap beberapa aspek penting seperti kepemimpinan yang visioner dan amanah, pengembangan tenaga pendidik dan kependidikan yang kompeten dan berakhlak, sistem pembelajaran yang holistik, serta manajemen sarana prasarana dan keuangan yang transparan dan berorientasi pada keberlanjutan. Semua ini harus dikelola dengan prinsip-prinsip Islami yang menekankan pada keadilan, musyawarah, tanggung jawab, dan keberkahan (Hambali & Mu'alimin, 2020).

Pentingnya pengelolaan lembaga pendidikan Islam secara profesional tidak hanya terkait dengan aspek efisiensi organisasi, tetapi juga memiliki implikasi jangka panjang terhadap kualitas generasi Muslim masa depan. Lembaga pendidikan yang dikelola dengan baik akan menjadi pusat peradaban yang mampu mencetak lulusan yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga unggul dalam nilai-nilai moral dan sosial. Oleh karena itu, pembahasan mengenai pengelolaan lembaga pendidikan Islam dalam perspektif manajemen pendidikan sangat penting untuk dilakukan, guna menemukan strategi dan pendekatan yang tepat dalam meningkatkan kualitas lembaga pendidikan Islam di berbagai level dan jenisnya.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi pustaka, yaitu dengan melakukan kajian literatur terhadap berbagai sumber tertulis yang relevan dengan topik pengelolaan lembaga pendidikan Islam dalam perspektif manajemen pendidikan. Peneliti akan mengumpulkan dan menganalisis berbagai buku, jurnal, artikel, dan dokumen lain yang membahas konsep-konsep manajemen pendidikan, prinsip-prinsip Islam dalam pendidikan, serta teori-teori yang berkaitan dengan perencanaan strategis, pengorganisasian, kepemimpinan, pengelolaan sumber daya manusia, dan proses pembelajaran dalam konteks lembaga pendidikan Islam. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif dengan

pendekatan deskriptif untuk menggambarkan penerapan konsep manajemen pendidikan Islam dalam pengelolaan lembaga pendidikan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Perencanaan Strategis yang Berbasis Nilai Islam

Perencanaan strategis dalam lembaga pendidikan Islam merupakan fondasi utama yang menentukan arah, identitas, serta keberlangsungan lembaga dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Dalam perspektif manajemen pendidikan, perencanaan strategis tidak hanya dilihat sebagai proses teknis administratif semata, tetapi juga sebagai proses ideologis dan nilai yang sarat dengan makna keislaman. Hal ini karena lembaga pendidikan Islam tidak hanya bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, tetapi juga memiliki misi sakral dalam membentuk manusia yang bertakwa, berakhlak mulia, dan berilmu sebagai khalifah di muka bumi.

Perencanaan strategis yang berbasis nilai Islam harus dimulai dari penanaman visi dan misi yang mencerminkan tujuan utama pendidikan Islam itu sendiri, yaitu membentuk manusia yang seimbang secara jasmani dan rohani, intelektual dan spiritual. Visi dan misi tersebut harus disusun dengan mempertimbangkan ajaran Al-Qur'an dan Sunnah sebagai sumber utama nilai-nilai pendidikan Islam. Dalam hal ini, perencanaan tidak hanya menasar pada peningkatan mutu akademik atau pencapaian target kuantitatif, tetapi juga pada penanaman nilai-nilai seperti kejujuran (*sidq*), amanah, keadilan, dan tanggung jawab sosial (Andini & Aslami, 2023).

Sebagai contoh, dalam proses penyusunan rencana strategis, lembaga pendidikan Islam seharusnya melibatkan seluruh unsur pemangku kepentingan (stakeholders), seperti guru, kepala sekolah, komite, tokoh agama, dan masyarakat, melalui pendekatan musyawarah. Ini sejalan dengan prinsip *syura* yang diajarkan dalam Islam sebagai mekanisme pengambilan keputusan yang demokratis dan partisipatif. Dengan melibatkan berbagai pihak, maka perencanaan akan mencerminkan aspirasi kolektif yang bersifat visioner, inklusif, dan realistis.

Lebih jauh, perencanaan strategis harus mengacu pada analisis lingkungan internal dan eksternal yang dilakukan secara objektif. Dalam konteks Islam, analisis tersebut bukan hanya berdasarkan kekuatan dan kelemahan dalam aspek manajerial, tetapi juga mencakup evaluasi spiritualitas lembaga, ketaatan warga sekolah terhadap ajaran Islam, serta pengaruh lingkungan sosial yang dapat mendukung atau menghambat pelaksanaan misi Islam dalam pendidikan. Oleh karena itu, pendekatan perencanaan yang digunakan tidak boleh mengabaikan nilai-nilai transendental yang menjadi ruh lembaga tersebut.

Dalam praktiknya, perencanaan strategis berbasis nilai Islam perlu dituangkan dalam program kerja tahunan dan jangka menengah-panjang yang mengintegrasikan pengembangan kurikulum Islami, peningkatan kualitas SDM Islami, penguatan tata kelola berbasis syariah, serta pembangunan budaya sekolah yang religius dan humanis. Setiap kegiatan yang dirancang dalam rencana kerja harus memiliki indikator keberhasilan tidak hanya dari sisi kuantitas, tetapi juga kualitas akhlak dan spiritual peserta didik dan tenaga pendidik (Akhyar et al., 2024).

Salah satu tantangan yang kerap dihadapi dalam menerapkan perencanaan strategis ini adalah dikotomi antara manajemen modern yang berbasis logika efisiensi dan efektivitas, dengan nilai-nilai Islam yang menekankan keberkahan, keikhlasan, dan tujuan akhirat. Maka dari itu, diperlukan kemampuan dari para pemimpin lembaga untuk mensinergikan dua pendekatan ini menjadi satu sistem yang holistik. Misalnya, dalam menetapkan tujuan strategis lembaga, pimpinan dapat menggunakan prinsip SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound), tetapi tetap dipadukan dengan nilai *niyyah* (niat ikhlas), *barakah* (keberkahan), dan *taqwa* sebagai indikator keberhasilan sejati (Barsihannor, 2021).

Sebagai penutup, perencanaan strategis dalam lembaga pendidikan Islam tidak boleh dilepaskan dari nilai-nilai teologis yang menjadi dasar pijakan seluruh proses pendidikan. Ia harus menjadi media untuk mewujudkan cita-cita luhur pendidikan Islam sebagai wahana pembentukan manusia paripurna (*insan kamil*) yang mampu mengemban amanah Allah di bumi. Melalui perencanaan yang sistematis, partisipatif, dan berbasis nilai Islam, lembaga pendidikan akan memiliki arah yang jelas, landasan yang kokoh, serta kesiapan dalam menjawab tantangan zaman tanpa kehilangan jati diri keislamannya.

Pengorganisasian yang Efisien dan Berorientasi Kolaboratif

Pengorganisasian dalam manajemen pendidikan Islam merupakan proses penting yang memastikan setiap komponen dalam lembaga berjalan secara sistematis, sinergis, dan sesuai dengan fungsi serta perannya. Dalam konteks lembaga pendidikan Islam, pengorganisasian tidak hanya dipahami sebagai penataan struktur kelembagaan secara administratif, melainkan juga sebagai upaya membangun tatanan kerja yang dilandasi oleh nilai-nilai keislaman, seperti keadilan, tanggung jawab, kebersamaan, dan pelayanan (*khidmah*).

Efisiensi dalam pengorganisasian mengacu pada kemampuan lembaga dalam memanfaatkan sumber daya manusia, waktu, dan sarana secara optimal untuk mencapai tujuan pendidikan. Artinya, setiap personel dalam lembaga harus ditempatkan sesuai dengan kompetensinya (*the right man in the right place*), memiliki uraian tugas yang jelas, serta memahami peran dan kontribusinya dalam proses pendidikan. Efisiensi juga menuntut adanya

struktur organisasi yang tidak terlalu birokratis namun cukup untuk memastikan adanya koordinasi dan kontrol yang baik (Nurkamiden & Anwar, 2023).

Namun, dalam kerangka pendidikan Islam, efisiensi ini harus diseimbangkan dengan pendekatan kolaboratif. Islam mengajarkan pentingnya kerja sama dalam kebaikan (*ta'awun 'ala al-birr wa al-taqwa*) dan menolak individualisme yang merusak kebersamaan. Oleh karena itu, pengorganisasian dalam lembaga pendidikan Islam perlu dirancang untuk mendorong budaya kerja yang partisipatif dan saling mendukung antar komponen lembaga—baik kepala sekolah, guru, staf administrasi, siswa, maupun orang tua dan masyarakat.

Kolaborasi dalam lembaga pendidikan Islam menjadi kekuatan strategis yang mendorong terciptanya sinergi. Lembaga yang berorientasi kolaboratif tidak hanya membangun hubungan kerja vertikal antara atasan dan bawahan, tetapi juga menciptakan hubungan horizontal yang sehat antarsesama rekan kerja. Melalui forum-forum internal seperti rapat rutin, musyawarah kerja, dan majelis guru, keputusan-keputusan penting diambil secara bersama dan didasarkan pada prinsip syura (musyawarah), yang merupakan metode pengambilan keputusan yang sangat dianjurkan dalam Islam. Hal ini mencerminkan bahwa setiap anggota organisasi memiliki hak suara, dihargai pendapatnya, dan merasa memiliki terhadap lembaga.

Dalam praktiknya, pengorganisasian kolaboratif membutuhkan kepemimpinan yang terbuka dan komunikatif. Pemimpin lembaga harus mampu menggerakkan semua unsur dalam organisasi, mendengarkan masukan dari bawahan, dan menciptakan ruang dialog yang konstruktif. Selain itu, penting juga untuk menciptakan struktur organisasi yang adaptif terhadap perubahan zaman. Struktur yang terlalu kaku akan menghambat kreativitas dan fleksibilitas lembaga dalam merespons tantangan dan kebutuhan peserta didik serta masyarakat (Sastratmadja et al., 2023).

Salah satu ciri khas pengorganisasian dalam lembaga pendidikan Islam adalah adanya nilai spiritual yang menjadi pengikat kerja sama antar individu. Dalam tataran praktis, budaya kerja Islami seperti saling mendoakan, menjaga ukhuwah, mengedepankan kejujuran, dan menjunjung tinggi etika profesi menjadi bagian dari sistem kerja yang tak terpisahkan. Hal ini menciptakan lingkungan kerja yang harmonis dan penuh keikhlasan, di mana setiap individu bekerja tidak hanya untuk memenuhi kewajiban formal, tetapi juga sebagai bentuk ibadah dan pengabdian kepada Allah SWT.

Pengorganisasian yang efisien dan kolaboratif juga tampak dalam bagaimana tugas-tugas dibagi dan dikelola. Dalam lembaga pendidikan Islam yang baik, setiap unit kerja memiliki tujuan dan indikator kinerja yang selaras dengan visi dan misi lembaga. Misalnya, tim pengembang kurikulum, tim pengawasan, tim kesiswaan, dan tim kehumasan, semua memiliki

fungsi yang saling melengkapi. Keterpaduan antar bagian inilah yang menjadikan sistem berjalan secara sinergis, tanpa tumpang tindih peran ataupun konflik kewenangan.

Di sisi lain, kolaborasi juga perlu diperluas hingga ke luar organisasi. Lembaga pendidikan Islam yang mampu menjalin kemitraan dengan masyarakat, lembaga keagamaan, pemerintah, dan institusi lainnya akan lebih dinamis dalam mengembangkan program-program pendidikan. Kolaborasi eksternal ini mencerminkan semangat *rahmatan lil 'alamin* dalam pendidikan Islam, di mana lembaga hadir sebagai agen transformasi sosial yang terbuka terhadap sinergi kebaikan dari berbagai pihak.

Dengan demikian, pengorganisasian dalam lembaga pendidikan Islam idealnya bukan hanya tertata secara administratif dan teknis, tetapi juga menyatu dengan nilai-nilai spiritual dan sosial Islam. Pengorganisasian yang efisien dan berorientasi kolaboratif akan menciptakan lembaga yang tidak hanya unggul dalam tata kelola, tetapi juga kokoh dalam budaya kerja dan kuat dalam keberkahan. Di sinilah pentingnya merancang sistem organisasi pendidikan Islam yang mampu menyeimbangkan antara profesionalisme dan nilai-nilai keislaman sebagai wujud tanggung jawab atas amanah pendidikan.

Kepemimpinan Islami sebagai Pilar Utama Pengelolaan

Kepemimpinan merupakan unsur kunci dalam seluruh proses manajerial, termasuk dalam pengelolaan lembaga pendidikan Islam. Dalam perspektif manajemen pendidikan, keberhasilan suatu lembaga sangat bergantung pada kualitas kepemimpinan yang dimiliki oleh pemimpinnya. Namun, dalam konteks Islam, kepemimpinan tidak hanya dimaknai sebagai kemampuan mengarahkan dan mengatur sumber daya untuk mencapai tujuan, tetapi lebih dari itu, ia merupakan amanah besar yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab dunia dan akhirat.

Kepemimpinan dalam pendidikan Islam berpijak pada konsep dasar bahwa seorang pemimpin adalah pelayan bagi orang-orang yang dipimpinnya. Prinsip ini berakar dari sabda Rasulullah SAW, “Pemimpin suatu kaum adalah pelayan mereka” (*Sayyidul qaumi khadimuhum*). Dengan demikian, kepemimpinan dalam Islam memiliki dimensi spiritual, moral, dan sosial yang sangat dalam. Seorang kepala sekolah atau pimpinan lembaga pendidikan Islam bukan hanya administrator atau manajer, tetapi juga panutan, pembimbing rohani, serta penanggung jawab dalam menanamkan nilai-nilai Islam di seluruh aspek pendidikan (Dwiayama, 2018).

Karakteristik kepemimpinan Islami menekankan pada empat sifat utama yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, yakni *siddiq* (jujur), *amanah* (dapat dipercaya), *tabligh* (komunikatif dan menyampaikan kebenaran), dan *fathanah* (cerdas dan bijaksana).

Seorang pemimpin lembaga pendidikan Islam harus menjadikan keempat sifat ini sebagai landasan dalam menjalankan tugasnya sehari-hari. Kejujuran dalam mengambil kebijakan, amanah dalam mengelola dana dan tanggung jawab, kemampuan berkomunikasi dengan seluruh warga sekolah, serta kecerdasan dalam menyusun strategi dan memecahkan masalah menjadi syarat mutlak bagi keberhasilan kepemimpinan Islami.

Lebih dari sekadar menjalankan fungsi-fungsi administratif, pemimpin dalam lembaga pendidikan Islam harus mampu menciptakan lingkungan yang bernuansa religius dan inklusif. Ia harus menjadi teladan dalam hal akhlak, disiplin, spiritualitas, dan kerja keras. Pemimpin seperti ini tidak memimpin dengan tangan besi, tetapi dengan keteladanan yang menginspirasi. Keteladanan adalah metode paling efektif dalam pendidikan Islam karena peserta didik dan tenaga kependidikan akan lebih mudah meniru perilaku daripada hanya mendengar perintah atau nasihat. Kepemimpinan yang mencontohkan akhlak Islami akan membentuk budaya organisasi yang sehat, penuh nilai, dan berorientasi pada kebaikan bersama (Sarnoto, 2016).

Dalam pelaksanaannya, kepemimpinan Islami juga harus bersifat partisipatif. Artinya, pimpinan lembaga tidak bersikap otoriter dalam mengambil keputusan, tetapi mengedepankan musyawarah, mengajak guru dan staf untuk berdiskusi, serta membuka ruang partisipasi dalam menyusun program dan kebijakan. Musyawarah adalah bentuk penerapan nilai *syura*, yang tidak hanya mencerminkan demokrasi Islam, tetapi juga menjadi jalan untuk membangun rasa memiliki dan tanggung jawab bersama terhadap lembaga.

Selain itu, kepemimpinan Islami juga memerlukan kemampuan dalam mengelola konflik secara adil dan bijaksana. Lembaga pendidikan adalah tempat berkumpulnya berbagai karakter dan latar belakang, sehingga perbedaan pendapat dan ketegangan sering kali tidak terelakkan. Di sinilah pentingnya sikap adil dan kemampuan seorang pemimpin untuk menjadi penengah yang netral, yang mampu menyelesaikan konflik tanpa menciptakan permusuhan, melainkan dengan mengedepankan persaudaraan dan prinsip *islah* (perdamaian).

Di era modern, tantangan yang dihadapi oleh lembaga pendidikan Islam semakin kompleks, termasuk tekanan globalisasi, tuntutan mutu pendidikan, keterbatasan anggaran, dan perkembangan teknologi. Pemimpin Islami dituntut tidak hanya memiliki ketakwaan dan integritas, tetapi juga kapasitas manajerial yang profesional. Ia harus memahami perencanaan strategis, evaluasi program, manajemen mutu, hingga digitalisasi pendidikan. Namun demikian, profesionalitas ini harus tetap terbingkai dalam kerangka nilai-nilai Islam, agar pendidikan tidak kehilangan arah spiritualnya (Mubarak, 2017).

Peran kepemimpinan Islami juga sangat penting dalam membentuk visi lembaga dan menggerakkan seluruh sumber daya menuju pencapaian visi tersebut. Visi yang dibangun oleh

pemimpin Islam bukan hanya tentang pencapaian akademik, tetapi juga tentang penciptaan generasi yang saleh, berakhlak, dan berkontribusi positif dalam masyarakat. Dengan visi yang kuat dan dipadukan dengan kepemimpinan yang penuh integritas, lembaga pendidikan Islam akan memiliki daya tahan tinggi dalam menghadapi tantangan serta mampu memberikan pengaruh positif yang luas di tengah masyarakat.

Pada akhirnya, kepemimpinan Islami bukan hanya sebuah jabatan, tetapi amanah yang mengandung dimensi ibadah. Pemimpin yang baik dalam pendidikan Islam adalah mereka yang tidak hanya mengatur, tetapi juga membina dan mengasuh. Ia adalah pemegang tanggung jawab untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas pendidikan berjalan sejalan dengan nilai-nilai keislaman dan membawa keberkahan, bukan hanya pencapaian duniawi. Maka dari itu, keberhasilan pengelolaan lembaga pendidikan Islam sangat bergantung pada kualitas dan karakter kepemimpinan yang dijalankan—kepemimpinan yang kokoh dalam manajemen dan luhur dalam akhlak.

Pengelolaan Sumber Daya Manusia yang Profesional dan Berintegritas

Sumber daya manusia (SDM) merupakan inti dari setiap lembaga pendidikan, dan dalam konteks pendidikan Islam, SDM tidak hanya dipandang sebagai tenaga kerja, tetapi juga sebagai mitra dakwah yang berperan penting dalam membentuk karakter peserta didik. Pengelolaan SDM dalam lembaga pendidikan Islam tidak dapat dilepaskan dari dua aspek penting: profesionalitas dan integritas. Profesionalitas mencakup aspek kompetensi, kinerja, dan produktivitas; sementara integritas mencerminkan nilai-nilai moral dan spiritual yang menjadi fondasi utama pendidikan Islam.

Pengelolaan SDM yang profesional berarti bahwa setiap individu yang terlibat dalam penyelenggaraan pendidikan baik guru, kepala sekolah, staf administrasi, maupun tenaga pendukung lainnya harus memiliki kapasitas yang memadai untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Guru sebagai ujung tombak pembelajaran harus memiliki kompetensi pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Guru dan Dosen. Dalam pendidikan Islam, guru juga memikul tanggung jawab moral sebagai *murabbi* (pendidik), *muallim* (pengajar), dan *mursyid* (pembimbing spiritual), sehingga kualifikasi keilmuan dan kesalehan pribadi harus berjalan seiring (Sondari & Anwar, 2022).

Profesionalisme SDM dalam lembaga pendidikan Islam harus dibangun melalui sistem rekrutmen yang selektif dan berbasis kompetensi serta nilai-nilai Islam. Seleksi tidak hanya berorientasi pada ijazah atau gelar, tetapi juga memperhatikan integritas pribadi, kemampuan berkomunikasi, dan kesesuaian dengan visi-misi lembaga. Pelatihan dan pengembangan

berkelanjutan perlu dilakukan untuk memastikan peningkatan kapasitas SDM secara konsisten. Dalam hal ini, program pelatihan tidak hanya menyentuh aspek pedagogik atau administrasi, tetapi juga melibatkan pembinaan keislaman, penguatan akhlak, serta penyegaran spiritual secara rutin agar nilai-nilai Islam senantiasa menjadi ruh dalam setiap aktivitas pendidikan.

Integritas menjadi dimensi penting yang membedakan pengelolaan SDM dalam pendidikan Islam dengan lembaga pendidikan umum lainnya. Integritas mengacu pada kesesuaian antara kata dan perbuatan, antara ajaran yang disampaikan dan sikap yang ditampilkan. Dalam Islam, integritas sangat ditekankan karena ia merupakan wujud nyata dari iman dan ketakwaan seseorang. Seorang guru yang berintegritas tidak hanya pandai mengajar, tetapi juga menjadi teladan dalam kejujuran, kedisiplinan, tanggung jawab, dan komitmen terhadap nilai-nilai Islam. Guru yang berintegritas akan menghindari penyimpangan seperti manipulasi nilai, sikap diskriminatif terhadap siswa, atau ketidaksesuaian antara teori yang diajarkan dengan praktik kehidupan sehari-hari.

Pengelolaan SDM yang baik juga mencakup evaluasi kinerja yang adil, transparan, dan konstruktif. Evaluasi bukan sekadar alat untuk menilai kesalahan atau kekurangan, tetapi juga sebagai sarana untuk mendorong perbaikan dan pertumbuhan profesional. Dalam kerangka Islam, evaluasi juga harus disertai dengan pendekatan yang bijak dan berorientasi pada perbaikan, bukan penghukuman. Prinsip *taubah* dan *islah* menjadi dasar dalam membina SDM yang mungkin memiliki kekurangan, tetapi masih bisa diperbaiki dengan pendekatan spiritual dan pembinaan yang tepat.

Di sisi lain, loyalitas dan keterikatan emosional (*emotional engagement*) antara SDM dengan lembaga menjadi hal yang tak kalah penting. Dalam pendidikan Islam, hubungan antara guru dan lembaga bukan semata hubungan kontraktual, tetapi juga hubungan nilai. Guru dan staf harus merasa menjadi bagian dari keluarga besar lembaga, memiliki rasa tanggung jawab kolektif, dan berjuang bersama dalam mencapai visi-misi pendidikan Islam. Rasa memiliki ini akan memunculkan semangat bekerja yang tinggi, dedikasi yang tulus, serta kemampuan berkorban demi kemajuan lembaga.

Dalam konteks manajemen strategis, pengelolaan SDM dalam pendidikan Islam juga harus memperhatikan sistem insentif dan penghargaan yang adil dan memotivasi. Meskipun lembaga pendidikan Islam sering kali menghadapi keterbatasan dana, namun penghargaan tidak selalu harus bersifat material. Pengakuan, pelibatan dalam pengambilan keputusan, kepercayaan dalam memegang tanggung jawab, serta suasana kerja yang nyaman dan Islami, adalah bentuk penghargaan yang sangat bernilai bagi para pendidik dan tenaga kependidikan (Ansori et al., 2023).

Selain itu, pengelolaan SDM dalam lembaga pendidikan Islam harus dilandasi oleh nilai-nilai spiritual yang mendalam. Aktivitas manajerial bukan hanya dijalankan dengan standar duniawi, tetapi juga dipadukan dengan kesadaran akan tanggung jawab ukhrawi. Setiap tindakan dalam mengelola guru, staf, dan tenaga pendidik harus diarahkan pada tujuan besar pendidikan Islam, yaitu mencetak manusia beriman, berilmu, dan berakhlak. Dengan landasan spiritual ini, pengelolaan SDM akan menjelma menjadi aktivitas yang bernilai ibadah dan sarat keberkahan.

Dengan demikian, pengelolaan sumber daya manusia yang profesional dan berintegritas merupakan syarat mutlak bagi keberhasilan lembaga pendidikan Islam. Profesionalisme akan memastikan efisiensi dan kualitas dalam pelaksanaan tugas, sementara integritas akan menjamin keikhlasan dan kebenaran dalam pelaksanaan amanah pendidikan. Keduanya harus dipadukan dalam satu sistem pengelolaan yang humanis, visioner, dan Islami, agar lembaga pendidikan Islam mampu berkembang secara berkelanjutan dan berkontribusi nyata dalam mencetak generasi unggul yang berakhlak mulia.

Pelaksanaan Proses Pembelajaran yang Holistik dan Terintegrasi

Proses pembelajaran merupakan jantung dari penyelenggaraan pendidikan, karena dari sinilah seluruh tujuan pendidikan diupayakan untuk diwujudkan. Dalam lembaga pendidikan Islam, pelaksanaan pembelajaran tidak hanya berorientasi pada pencapaian kompetensi akademik semata, tetapi juga pada pembentukan kepribadian yang utuh—baik dari aspek spiritual, intelektual, emosional, maupun sosial. Oleh karena itu, pendekatan pembelajaran yang holistik dan terintegrasi menjadi keniscayaan dalam menciptakan lulusan yang tidak hanya cerdas, tetapi juga saleh dan berakhlak mulia.

Pembelajaran yang holistik dalam pendidikan Islam berarti pembelajaran yang menyentuh seluruh aspek fitrah manusia. Islam memandang manusia sebagai makhluk multidimensi yang memiliki potensi jasmani, akal, dan ruhani, yang semuanya harus dikembangkan secara seimbang. Proses pembelajaran yang ideal adalah yang mampu merangsang perkembangan kognitif siswa, menumbuhkan sikap positif terhadap nilai-nilai Islam, serta mengasah keterampilan sosial dan emosional. Tujuannya bukan hanya menciptakan peserta didik yang pintar, tetapi juga sadar akan tanggung jawab sebagai hamba Allah dan khalifah di muka bumi (Supriani et al., 2022).

Dalam pendekatan holistik, materi pembelajaran tidak diajarkan secara terpisah dan mekanistik, tetapi dikaitkan dengan nilai-nilai kehidupan dan keimanan. Setiap mata pelajaran, baik keagamaan maupun umum, harus diarahkan untuk membentuk karakter Islami. Misalnya, dalam pembelajaran sains, guru dapat menanamkan nilai-nilai ketauhidan melalui pemahaman

akan kebesaran ciptaan Allah; dalam matematika, guru dapat membangun sikap disiplin, logika berpikir, dan kejujuran; dalam IPS, siswa diajak memahami dinamika sosial dalam kerangka tanggung jawab sebagai bagian dari masyarakat. Dengan demikian, semua ilmu menjadi bagian dari cara mengenal Allah dan mendekatkan diri kepada-Nya, bukan sekadar untuk kepentingan duniawi.

Integrasi dalam pembelajaran juga mencakup upaya menyatukan antara teori dan praktik, antara pengetahuan dengan pengalaman, serta antara kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Pendidikan Islam tidak cukup hanya dengan ceramah atau pengajaran di ruang kelas, tetapi harus dibarengi dengan keteladanan, pembiasaan, dan pengalaman nyata yang membentuk perilaku. Misalnya, pembelajaran tentang shalat tidak hanya disampaikan secara teori, tetapi juga dilatih melalui praktik berjamaah di sekolah. Demikian juga pelajaran tentang jujur atau tolong-menolong tidak hanya diceramahkan, tetapi diwujudkan dalam kegiatan sosial, kerja sama kelompok, dan interaksi harian siswa.

Di sinilah pentingnya peran guru sebagai fasilitator, pembimbing, sekaligus teladan. Guru harus mampu merancang proses pembelajaran yang bermakna, kontekstual, dan menyentuh aspek spiritual siswa. Guru tidak hanya mengajar, tetapi juga membimbing, menginspirasi, dan membentuk budaya belajar yang Islami. Dalam sistem pembelajaran yang holistik, guru dituntut untuk kreatif dan reflektif—mampu menyesuaikan metode dan strategi mengajar sesuai kebutuhan siswa dan kondisi zaman, tanpa menghilangkan esensi ajaran Islam (Fathih & Muhlis, 2023).

Pelaksanaan pembelajaran yang terintegrasi juga harus didukung oleh kurikulum yang dirancang secara menyeluruh, dengan menjadikan Al-Qur'an dan sunnah sebagai sumber utama. Integrasi antara ilmu agama dan ilmu umum merupakan prinsip penting dalam pendidikan Islam, karena tidak ada dikotomi antara keduanya. Semua ilmu bersumber dari Allah dan harus digunakan untuk kemaslahatan. Maka dari itu, kurikulum perlu dirancang agar setiap pelajaran mampu menumbuhkan spiritualitas, selain kompetensi akademik. Integrasi ini juga mencakup kolaborasi antara guru PAI dengan guru bidang lain dalam menyusun kegiatan pembelajaran terpadu.

Pembelajaran holistik dan terintegrasi juga berarti adanya kesinambungan antara sekolah, keluarga, dan masyarakat. Pendidikan tidak akan berhasil jika hanya dilaksanakan di lingkungan sekolah tanpa dukungan dan sinergi dari orang tua dan lingkungan sekitar. Lembaga pendidikan Islam harus menjalin komunikasi yang baik dengan wali murid, mengadakan kegiatan keagamaan bersama, serta membuka ruang partisipasi masyarakat dalam

kegiatan sekolah. Lingkungan yang mendukung nilai-nilai Islam akan memperkuat proses internalisasi nilai yang ditanamkan di sekolah.

Dalam konteks manajemen pendidikan Islam, pelaksanaan pembelajaran yang holistik dan terintegrasi harus dipantau dan dievaluasi secara berkala untuk memastikan bahwa seluruh unsur pembelajaran berjalan sesuai tujuan. Evaluasi tidak hanya menyoroti hasil kognitif siswa, tetapi juga mencakup sikap, spiritualitas, dan keterampilan sosial. Lembaga pendidikan Islam harus mampu menciptakan sistem evaluasi yang komprehensif dan berimbang antara aspek duniawi dan ukhrawi (Hambali & Mu'alimin, 2020).

Dengan demikian, pelaksanaan proses pembelajaran yang holistik dan terintegrasi merupakan pilar penting dalam pengelolaan lembaga pendidikan Islam yang berkualitas. Ia menciptakan pengalaman belajar yang utuh, menyeluruh, dan bermakna bagi peserta didik, serta menanamkan nilai-nilai Islam secara mendalam dalam setiap aspek kehidupan siswa. Melalui pendekatan ini, pendidikan Islam dapat menghasilkan generasi yang tidak hanya cerdas dalam berpikir, tetapi juga kuat dalam iman, luhur dalam akhlak, dan siap mengambil peran strategis dalam kehidupan masyarakat global secara Islami.

Pengawasan dan Evaluasi Berbasis Prinsip Akuntabilitas dan Transparansi

Pengawasan dan evaluasi dalam pendidikan memiliki peranan yang sangat penting dalam memastikan bahwa tujuan pendidikan tercapai secara efektif dan efisien. Dalam konteks lembaga pendidikan Islam, pengawasan dan evaluasi tidak hanya berfungsi untuk mengukur pencapaian akademik atau operasional, tetapi juga untuk memastikan bahwa seluruh proses pendidikan berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, yang mengedepankan nilai-nilai kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab. Dalam hal ini, akuntabilitas dan transparansi menjadi dua prinsip utama yang harus diterapkan dalam setiap tahap pengawasan dan evaluasi.

Akuntabilitas dalam pengelolaan pendidikan Islam menekankan pentingnya pertanggungjawaban terhadap segala tindakan dan keputusan yang diambil dalam lembaga pendidikan. Setiap tindakan yang diambil oleh pengelola pendidikan, baik itu kepala sekolah, guru, atau staf administrasi, harus dapat dipertanggungjawabkan baik kepada Allah SWT, masyarakat, maupun pihak terkait lainnya. Akuntabilitas ini juga berarti bahwa setiap sumber daya yang dikelola, baik itu keuangan, fasilitas, maupun tenaga pendidik, harus digunakan secara tepat dan sesuai dengan tujuan lembaga pendidikan Islam yang mengedepankan kesejahteraan dan pembinaan generasi yang berakhlak mulia.

Dalam prakteknya, akuntabilitas dalam pendidikan Islam memerlukan adanya sistem yang jelas untuk memonitor dan mengevaluasi kinerja setiap individu dan unit kerja dalam lembaga. Kepala sekolah atau pimpinan lembaga harus dapat mengelola seluruh aspek

pendidikan dengan transparan, termasuk dalam pengelolaan anggaran dan sumber daya manusia. Keputusan-keputusan yang diambil harus bersifat terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Ini penting untuk menjaga kepercayaan dari masyarakat, orang tua, dan pihak-pihak lain yang berkepentingan dalam proses pendidikan, serta untuk memastikan bahwa lembaga pendidikan tidak jatuh dalam praktik-praktik yang tidak etis atau penyalahgunaan wewenang (Andini & Aslami, 2023).

Transparansi, di sisi lain, merupakan prinsip yang berkaitan dengan keterbukaan informasi dalam setiap aspek pengelolaan lembaga pendidikan. Dalam konteks pendidikan Islam, transparansi berarti memberikan akses yang jelas dan terbuka kepada semua pihak yang terlibat dalam pendidikan—termasuk siswa, orang tua, guru, dan masyarakat—terhadap informasi yang relevan dengan kegiatan pendidikan. Hal ini mencakup transparansi dalam hal kurikulum, proses pembelajaran, pengelolaan keuangan, serta penilaian kinerja baik bagi siswa maupun tenaga pendidik.

Prinsip transparansi sangat penting dalam menciptakan kepercayaan antara lembaga pendidikan dengan seluruh stakeholder-nya. Ketika orang tua dan masyarakat mengetahui bagaimana anggaran lembaga digunakan, bagaimana kebijakan-kebijakan pendidikan dijalankan, dan bagaimana kinerja guru serta kepala sekolah dievaluasi, mereka akan merasa lebih terlibat dan memiliki rasa kepemilikan terhadap lembaga pendidikan tersebut. Dengan adanya transparansi, masyarakat juga dapat memberikan masukan atau kritik yang konstruktif, yang akan memperbaiki kualitas pendidikan di lembaga tersebut.

Untuk menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengawasan dan evaluasi, lembaga pendidikan Islam perlu membangun sistem yang jelas dan terstruktur. Pengawasan harus dilakukan secara menyeluruh, mencakup seluruh aspek operasional dan administratif lembaga, serta berdasar pada standar yang ditetapkan dalam dokumen visi, misi, dan tujuan pendidikan. Evaluasi harus dilakukan secara objektif dan berkelanjutan, dengan menggunakan instrumen yang relevan, baik berupa penilaian terhadap kinerja guru, kepemimpinan, kurikulum, maupun proses pembelajaran itu sendiri. Evaluasi tidak hanya mengukur hasil, tetapi juga proses yang dijalankan, untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip Islam diterapkan dalam setiap aspek.

Dalam praktiknya, pengawasan yang berbasis akuntabilitas dan transparansi juga berarti bahwa hasil evaluasi harus dipublikasikan dan disosialisasikan kepada seluruh stakeholders. Hal ini akan meningkatkan kesadaran akan pentingnya akuntabilitas dalam setiap tindakan, serta memungkinkan adanya umpan balik dari berbagai pihak yang dapat digunakan untuk perbaikan. Dalam konteks pendidikan Islam, hasil evaluasi juga harus mempertimbangkan

bukan hanya aspek intelektual atau akademik, tetapi juga nilai-nilai akhlak, spiritualitas, dan tanggung jawab sosial (Barsihannor, 2021).

Sebagai contoh, jika sebuah lembaga pendidikan Islam melakukan evaluasi terhadap kinerja seorang guru, maka hasil evaluasi tersebut harus disampaikan dengan cara yang membangun, baik kepada guru yang bersangkutan maupun kepada orang tua siswa. Selain itu, pihak lembaga pendidikan juga perlu memberikan kesempatan bagi guru untuk melakukan refleksi diri dan perbaikan berdasarkan hasil evaluasi. Hal yang sama berlaku pada evaluasi terhadap kebijakan dan program pendidikan yang dijalankan oleh lembaga, di mana hasil evaluasi harus transparan dan dapat diakses oleh semua pihak yang terlibat dalam pendidikan.

Selain itu, untuk mendukung pengawasan yang berbasis akuntabilitas dan transparansi, teknologi informasi dapat dimanfaatkan secara maksimal. Misalnya, dengan menggunakan sistem manajemen sekolah berbasis digital yang memungkinkan akses informasi secara real-time oleh semua pihak yang berkepentingan. Dengan demikian, pengawasan dan evaluasi tidak hanya lebih efisien, tetapi juga lebih terbuka dan akuntabel.

Penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengawasan dan evaluasi juga sangat berkaitan dengan penerapan prinsip keadilan dalam manajemen pendidikan Islam. Setiap kebijakan dan tindakan yang diambil harus dilandasi oleh rasa keadilan, dan tidak ada pihak yang dirugikan. Kebijakan yang tidak transparan dan tidak dapat dipertanggungjawabkan hanya akan menimbulkan ketidakpercayaan, ketidakadilan, dan akhirnya dapat merusak reputasi lembaga pendidikan.

Pada akhirnya, pengawasan dan evaluasi yang berbasis pada akuntabilitas dan transparansi tidak hanya bertujuan untuk mengukur kinerja dan pencapaian, tetapi juga untuk memastikan bahwa lembaga pendidikan Islam berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yang mengedepankan kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab. Dengan penerapan prinsip-prinsip ini, lembaga pendidikan Islam akan lebih dapat dipercaya, lebih efektif dalam menjalankan fungsinya, dan lebih mampu memberikan kontribusi yang signifikan dalam mencetak generasi yang tidak hanya cerdas, tetapi juga berakhlak mulia dan bertanggung jawab.

4. KESIMPULAN/CONCLUSION

Pengelolaan lembaga pendidikan Islam memerlukan pendekatan yang menyeluruh dan berbasis pada nilai-nilai Islam yang mendalam, guna menciptakan lembaga yang tidak hanya unggul dalam aspek akademik tetapi juga dalam pembentukan karakter dan akhlak peserta didik. Pentingnya perencanaan strategis berbasis nilai Islam menjadi kunci utama dalam

menetapkan arah dan tujuan lembaga pendidikan. Perencanaan ini haruslah terintegrasi dengan prinsip-prinsip Islam, dimana visi dan misi lembaga tidak hanya berfokus pada pencapaian tujuan duniawi, tetapi juga pada tujuan ukhrawi. Selain itu, pengorganisasian yang efisien dan berorientasi kolaboratif juga menjadi syarat penting dalam pengelolaan lembaga, dimana setiap komponen lembaga bekerja secara sinergis dan terkoordinasi, berlandaskan pada prinsip keadilan dan kebersamaan.

Kepemimpinan Islami merupakan pilar utama dalam pengelolaan lembaga pendidikan Islam. Seorang pemimpin dalam lembaga pendidikan Islam harus menjadi teladan dalam setiap aspek kehidupan, baik dalam pengambilan keputusan, pengelolaan sumber daya, maupun dalam memotivasi seluruh elemen lembaga untuk bekerja dengan penuh dedikasi. Kepemimpinan ini harus menekankan pada sifat-sifat mulia seperti kejujuran, amanah, dan kesabaran dalam menghadapi berbagai tantangan.

Pengelolaan sumber daya manusia yang profesional dan berintegritas juga menjadi faktor penentu dalam keberhasilan lembaga pendidikan Islam. SDM yang berkualitas tidak hanya dituntut untuk memiliki kompetensi profesional, tetapi juga harus menjunjung tinggi nilai-nilai integritas, kejujuran, dan akhlak mulia. Sistem rekrutmen, pelatihan, dan pengembangan SDM harus dilakukan secara berkesinambungan dengan tujuan untuk mencetak tenaga pendidik yang tidak hanya cakap dalam bidangnya, tetapi juga memiliki kecakapan dalam membentuk karakter siswa.

Dalam pelaksanaan proses pembelajaran yang holistik dan terintegrasi, lembaga pendidikan Islam harus mengutamakan pendekatan yang tidak hanya menekankan pada pencapaian kognitif siswa, tetapi juga pada aspek spiritual, emosional, dan sosial. Proses pembelajaran yang mengintegrasikan ilmu agama dan ilmu umum, serta mengedepankan nilai-nilai Islami, akan melahirkan peserta didik yang cerdas dalam pengetahuan dan mulia dalam akhlaknya. Pembelajaran yang holistik juga harus dilakukan dengan pendekatan yang melibatkan semua pihak, yaitu siswa, guru, orang tua, dan masyarakat.

Pengawasan dan evaluasi berbasis prinsip akuntabilitas dan transparansi menjadi landasan penting dalam memastikan keberlanjutan dan kesuksesan lembaga pendidikan Islam. Setiap langkah dalam pengelolaan lembaga harus dapat dipertanggungjawabkan kepada semua pihak yang terlibat, dan setiap kebijakan serta hasil evaluasi harus terbuka dan jelas. Pengawasan yang transparan akan menciptakan kepercayaan, sementara akuntabilitas akan memastikan bahwa semua sumber daya digunakan secara efisien dan efektif, serta sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Secara keseluruhan, pengelolaan lembaga pendidikan Islam yang efektif membutuhkan integrasi antara prinsip-prinsip manajerial modern dengan nilai-nilai Islam yang luhur. Melalui penerapan prinsip-prinsip tersebut, lembaga pendidikan Islam akan mampu mencetak generasi yang tidak hanya unggul dalam ilmu pengetahuan, tetapi juga memiliki akhlak yang mulia dan siap untuk berkontribusi dalam membangun masyarakat yang lebih baik, baik di dunia maupun di akhirat.

DAFTAR PUSTAKA

- Akhyar, M., & Zukdi, I. (2025). Ahmad Dahlan's Thoughts on Education as a Means of Empowering the People. *World Journal of Islamic Learning and Teaching*, 2(1), 1–12.
- Akhyar, M., Zukdi, I., & Deliani, N. (2024). Value-Based Leadership of Islamic Education Teachers and Its Role in Disciplinary Religious Practice Formation: A Qualitative Case Study in an Indonesian Public School. *Jurnal Pendidikan Islam*, 13(2), 97–105.
- Andini, F. T., & Aslami, N. (2023). Manajemen Perubahan dalam Prinsip Manajemen Pendidikan Islam. *Jurnal Ilmu Manajemen, Ekonomi Dan Kewirausahaan*, 3(2), 21–34.
- Ansori, A., Supangat, S., & Us, K. A. (2023). Mutu pendidikan dalam perspektif Islam. *Journal of Educational Administration and Leadership*, 4(2), 39–45.
- Barsihannor, B. (2021). Manajemen Pendidikan Islam. *Management of Education: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 7(2), 26–52.
- Dwiyama, F. (2018). Unsur Manajemen dalam Pengelolaan Lembaga Pendidikan Islam di Indonesia. *Adaara: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 7(1), 675–695.
- Fathih, M. A., & Muhlis, N. K. (2023). Problematika Penerapan Manajemen Pendidikan Di Lembaga Pendidikan Islam. In *Dirasah : Jurnal Studi Ilmu dan Manajemen Pendidikan Islam* (Vol. 6, Issue 1, pp. 20–29). Institut Agama Islam Faqih Asy'ari Kediri. <https://doi.org/10.58401/dirasah.v6i1.509>
- Hambali, M., & Mu'alimin. (2020). *Manajemen Pendidikan Islam Kontemporer*. IRCiSoD.
- Mubarok, A. (2017). Manajemen waktu dan perencanaan dalam perspektif manajemen pendidikan Islam (tinjauan Al-Qur'an surat Al-ashr: 1-3 dan Al-Hashr: 18). *Ma'fhum*, 2(2), 165–178.
- Nurkamiden, U. D., & Anwar, H. (2023). KONSEP MANAJEMEN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN PADA LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM. In *Tadbir: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* (Vol. 11, Issue 1, pp. 53–64). Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo. <https://doi.org/10.30603/tjmpi.v11i1.3384>
- Sarnoto, A. Z. (2016). Pengantar Studi Pendidikan Berbasis Al-Quran: Manajemen Pendidikan Dalam Perspektif Al-Quran. *Madani Institute: Jurnal Politik, Hukum, Pendidikan, Sosial, Dan Budaya*, 5(2).

- Sastraatmadja, A. H. M., Aji, N. U. B., Poetri, A. L., Alwi, M., Suyitno, M., Yundianto, D., Putri, A. M., Yani, Y., Budiyono, A. E., & Sholihannisa, L. U. (2023). *Manajemen Pendidikan Islam*. Sada Kurnia Pustaka.
- Sondari, E. S., & Anwar, C. (2022). Manajemen pendidikan Islam dalam perspektif Al-Qur'an. *Hijri*, 11(2), 124–134.
- Supriani, Y., Tanjung, R., Mayasari, A., & Arifudin, O. (2022). Peran Manajemen Kepemimpinan dalam Pengelolaan Lembaga Pendidikan Islam. In *JIIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* (Vol. 5, Issue 1, pp. 332–338). Ainara. <https://doi.org/10.54371/jiip.v5i1.417>